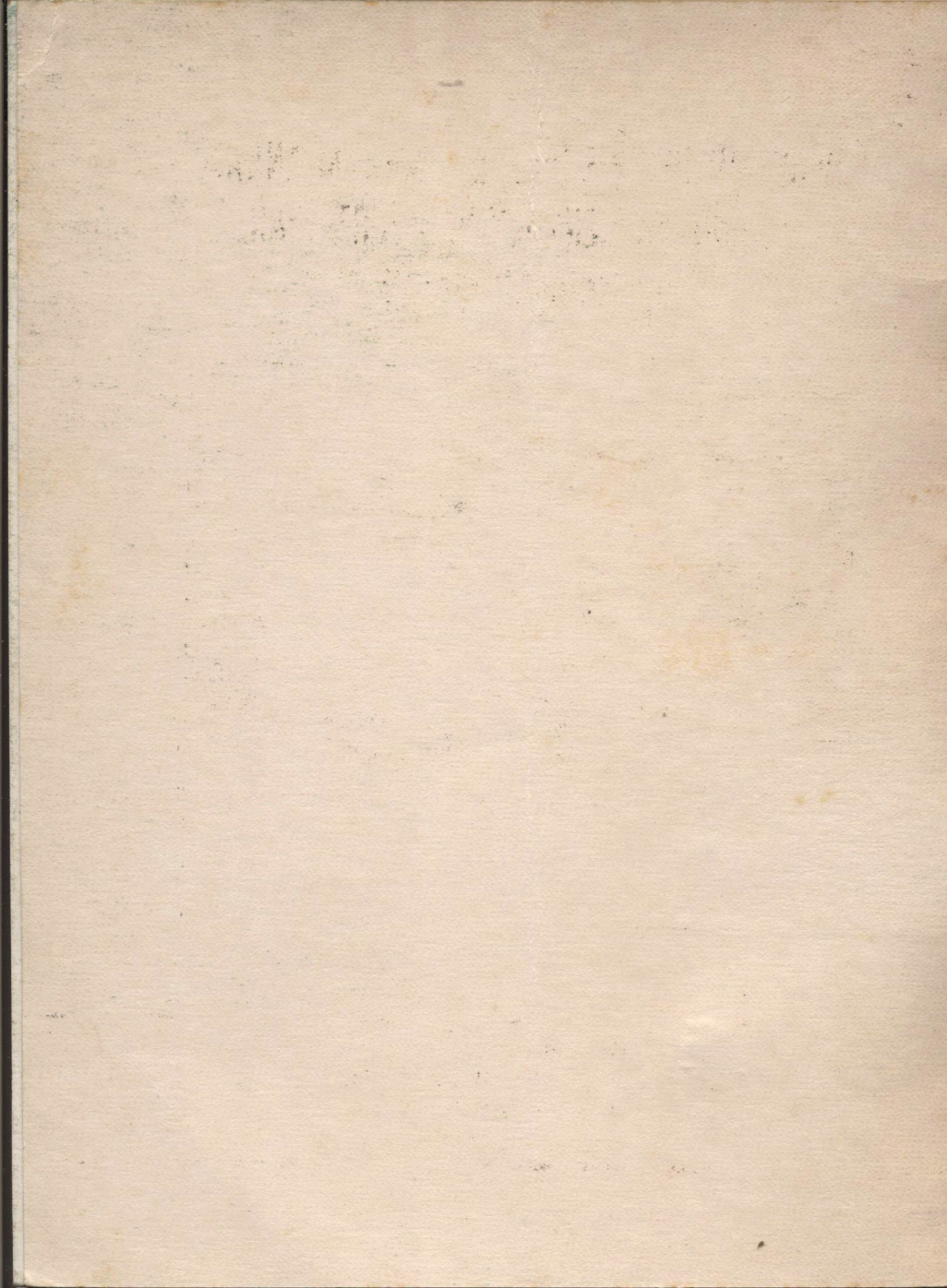




PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT WKBPP



DEPARTEMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA



Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian Nomor : 112/SK/LP.410/6/1989 tanggal 2 Juni 1989, maka kami merasa berkepentingan untuk menyebarluaskan petunjuk tersebut terutama mengenai "Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian di Tingkat WKBP".

Harapan kami semoga brosur ini dapat digunakan oleh para Penyuluh Pertanian dan Kontaktani — Nelayan di Propinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dan melaksanakan Program Penyuluhan di wilayah kerja masing-masing.

Kepala Balai Informasi Pertanian
Kalimantan Timur

ttd

Ir. Adeny Rozak AR, M.Ed.

NIP. 080 037 547

KATA PENGANTAR

Selamat datang Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Guru
yang telah hadir dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
di SMP Negeri 1 Jember 1999 tanggal 2 Juni 1999. Saya sangat
sangat senang untuk mengetahui bahwa Bapak telah
melakukan penelitian "Penerapan Penelitian Tindakan Kelas
dalam Penelitian Tindakan Kelas di Tingkat SMP".
Penelitian ini sangat penting bagi dunia pendidikan
dan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini sangat
penting karena penelitian ini sangat penting dalam meningkatkan
penelitian tindakan kelas di tingkat SMP.

Kepala Sekolah
Kebudayaan Tani

dan

Ir. Abadiy Rostik AR M Ed
NIP. 000 000 000

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

NOMOR : 112/SK/LP.410/6/1989

T E N T A N G

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN DI TINGKAT WKBPP**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dianggap perlu memadukan kebijaksanaan Pemerintah dengan kebutuhan aspirasi petani nelayan beserta keluarganya yang dituangkan dalam program penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan program penyuluhan pertanian ;
- b. bahwa program penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan program penyuluhan pertanian menggunakan prinsip satu kesatuan aparatur penyuluhan pertanian, satu kesatuan korps penyuluhan pertanian dan satu kesatuan pengertian tentang penyuluhan pertanian ;
- c. bahwa untuk mewujudkan adanya satu kesatuan gerak dan kegiatan yang berkesinambungan dalam penyuluhan pertanian dipandang perlu menetapkan pedoman penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pedoman penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian di Tingkat WKBPP.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Presiden RI No. 161/M Tahun 1987 ;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 558/Kpts/Org/6/1981 ;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. OT.210/706/Kpts/9/1983 ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 482/Kpts/LP.120/7/1985 ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 430/Kpts/OT.210/7/1986 ;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 1986
No. 695/Kpts/LP.120/11/1986.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian di Tingkat WKBPP sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian di tingkat WKBPP yang bertentangan dengan peraturan ini agar disesuaikan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Juni 1989

Kepala Badan,

t.t.d.

Ir. SYAMSUDDIN ABBAS

NIP. 080 015 407

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
2. Menteri Muda Pertanian ;
3. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian ;
4. Para Gubernur KDH, Tingkat I di seluruh Indonesia ;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Deptan di seluruh Indonesia ;
6. Para Bupati KDH, Tingkat II di seluruh Indonesia ;
7. Para Kepala Dinas Tingkat I dan II lingkup Pertanian di seluruh Indonesia ;
8. Para Kepala Balai Informasi Pertanian di seluruh Indonesia ;

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN DIKLATLUH PERTANIAN	iii
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Program Penyuluhan Pertanian	2
C. Cakupan Isi Program	3
II. UNSUR-UNSUR PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5
A. Keadaan	5
B. Tujuan	7
C. Masalah	7
D. Cara Mencapai Tujuan	8
III. MEKANISME, PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10
A. Mekanisme Penyusunan	10
B. Prosedur Penyusunan	11
C. Prosedur Penyampaian Program	22
IV. PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	23
A. Persiapan Pelaksanaan	23
B. Pelaksanaan Program	23
C. Monitoring dan Evaluasi Program	24
D. Laporan Program	31
E. Skema Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian	33
F. Pembiayaan Penyusunan dan Pelaksanaan	35

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh peranserta petani-nelayan dan keluarganya dalam melaksanakan kegiatan usaha tani-nelayannya. Peranserta petani-nelayan tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan pertanian, sehingga kegiatan usahanya dapat diarahkan selain untuk meningkatkan produksi, juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Agar upaya pembangunan pertanian dapat mencapai sasaran, penyuluhan pertanian sebagai ujung tombaknya harus dapat memadukan kebijaksanaan pemerintah (pusat dan daerah) dengan kepentingan dan keinginan petani-nelayan beserta keluarganya. Perpaduan antara kedua belah pihak tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Program Penyuluhan Pertanian.

Dalam Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 59 Tahun 1986 tertantum bahwa penyelenggara

No. 695/Kpts/LP.120/11/1986

garaan penyuluhan pertanian adalah kegiatan pendayagunaan dan penghasilgunaan segala sumberdaya pertanian berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara masyarakat petani-nelayan dengan pemerintah dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga tujuan penyuluhan pertanian harus berdasarkan prinsip satu kesatuan yang meliputi : satu kesatuan aparat, satu kesatuan korps, dan satu kesatuan pengertian tentang penyuluhan pertanian.

Untuk mewujudkan satu kesatuan gerak dalam penyuluhan pertanian, khususnya di tingkat WKBPP, perlu adanya suatu pedoman untuk dijadikan pegangan bagi para petugas dan penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian. Atas dasar pedoman tersebut diharapkan Program Penyuluhan Pertanian yang disusun setiap tahun dapat berdayaguna dan berhasilguna ter-

utama dalam melancarkan proses terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian.

Beberapa manfaat yang diperoleh bila Programa Penyuluhan pertanian disusun bersama adalah sebagai berikut :

- a. Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun akan lebih sesuai dengan kepentingan sasaran, sehingga dalam pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna.
- b. Akan lebih mudah dalam menarik dukungan peranserta masyarakat dalam melaksanakannya.
- c. Berkembangnya rasa tanggung jawab dan sikap positif terhadap pembangunan.
- d. Berkembangnya sikap hidup demokrasi.

Arti kebersamaan disini adalah melakukan sesuatu bersama petani-nelayan melalui musyawarah dan mufakat yang merupakan dasar untuk mendorong petani-nelayan dalam membantu dirinya sendiri.

B. PENGERTIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di setiap wilayah kerja BPP sebagai salah satu bagian program pembangunan pertanian, yang disusun secara tertulis dan sistimatis setiap tahun sekali.

Programa Penyuluhan Pertanian tersebut berisikan unsur-unsur : KEADAAN, TUJUAN, MASALAH, dan CARA MENCAPAI TUJUAN.

Hubungan antara Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dengan Programa Penyuluhan Pertanian tingkat WKBPP ditandai oleh penjabaran kebijaksanaan Pemerintah dari tingkat Pusat ke tingkat Propinsi, dari tingkat Propinsi ke tingkat Kabupaten/Kotamadya dan dari tingkat Kabupaten/Kotamadya ke tingkat WKBPP, masing-masing berdasarkan SK.

Mentan, SK. Gubernur dan SK. Bupati/Walikota. Penyusunannya dilaksanakan pada waktu yang bersamaan/tidak saling menunggu serta disesuaikan dengan kondisi petani-nelayan di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

Dengan demikian, antara penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya dengan Programa Penyuluhan Pertanian di tingkat WKBPP mempunyai keterkaitan yang jelas, namun juga mempunyai kewenangan tersendiri untuk menetapkan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian.

C. CAKUPAN ISI PROGRAM

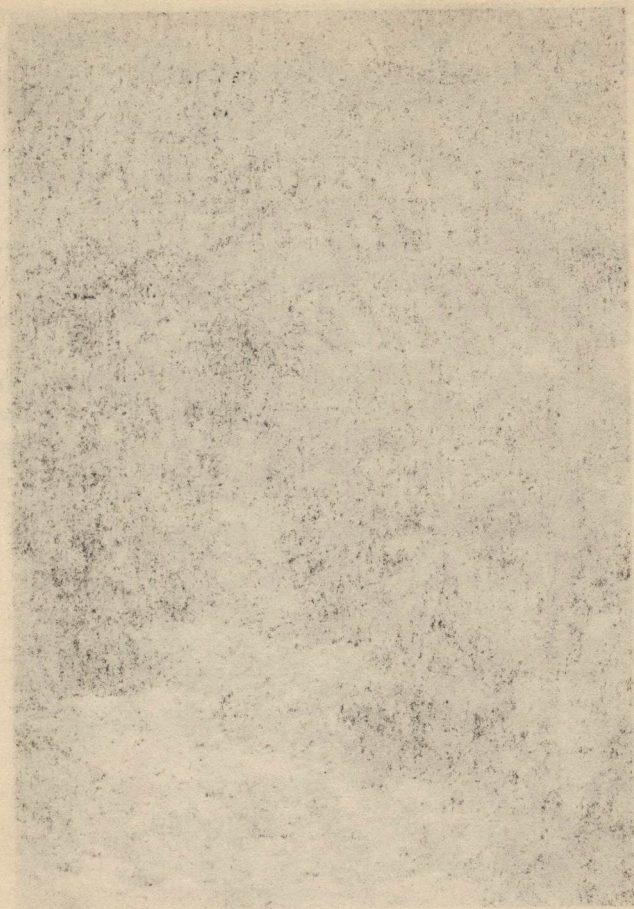
Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun di tingkat WKBPP pada hakekatnya meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pelestarian sumberdaya pertanian seperti manusia, alam dan buatan manusia. Kegiatan ini mencakup peningkatan mutu sumber manusia, penciptaan lapangan kerja di bidang pertanian, pengembangan dan pendayagunaan lahan usahatani dan sumber daya alam lainnya, pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana pertanian (waduk, jaringan irigasi, tanggul dan sebagainya).
2. Peningkatan produksi pertanian dengan melaksanakan diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi melalui perbaikan penerapan teknologi pra-panen, pasca panen serta rekayasa sosial. Upaya upaya tersebut merupakan daya dukung terhadap upaya mempertahankan swasembada pangan dan peningkatan ekspor komoditi non migas seperti komoditi tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan melalui peningkatan produktivitas komoditi pertanian yang diusahakan para petani-nelayan. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan keuntungan usaha tani diberbagai aspek antara lain efisien usahatani, penerapan azas ekonomi, pemilihan berbagai alternatif komoditas, pengembangan potensi wilayah, pemasaran, dan lain-lain.

4. Peningkatan gizi keluarga tani-nelayan melalui pembinaan organisasi masyarakat seperti Wanita tani-nelayan, PKK dan sebagainya, untuk terciptanya keseimbangan konsumsi beras, panganekaragaman bahan makanan, menu sehat keluarga dan lain-lain.
5. Pemantapan Organisasi dan kemampuan petani-nelayan dalam mencapai kesejahteraan keluarga tani-nelayan. Upaya-upaya ini antara lain peningkatan dinamika kelompok tani-nelayan/sub kelompok tani-nelayan guna meningkatkan kemampuan kelompok yang diukur dengan 10 jurus kemampuan.
6. Pengembangan dan pemantapan peranan petani-nelayan dalam keluarga sebagai wahana perekonomian masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani-nelayan. Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut di atas, para PPUP disetiap WKBPB harus berkonsultasi dengan Dinas-dinas dari setiap Sub Sektor lingkup Pertanian.



Programa Penyuluhan diantaranya berisi Peningkatan Pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan Produktivitas Usahatani.



Person responsible for the collection of
the specimens and the collection of
the data.

II. UNSUR-UNSUR PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Di dalam pengertian programa penyuluhan pertanian terdapat 4 (empat) unsur yang satu sama lain berkaitan yaitu KEADAAN, TUJUAN, MASALAH dan CARA MENCAPAI TUJUAN.

A. KEADAAN

Keadaan adalah merupakan informasi tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan Programa Penyuluhan Pertanian. Fakta-fakta ini harus ditunjukkan oleh data dan informasi yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu Programa Penyuluhan Pertanian. Data dan Informasi tersebut meliputi data tentang keadaan yang nyata pada saat itu (aktual) dan data potensial yaitu data tentang keadaan yang mungkin dicapai. Keadaan tersebut disajikan dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai hasil analisa data dan informasi yang telah terkumpul.

Jenis data dan informasi yang diperlukan terdiri dari :

1. Data Wilayah Kerja, yaitu data yang menggambarkan potensi dari berbagai bidang lingkup pertanian yang ada di wilayah kerja bersangkutan yang erat kaitannya dengan Programa Penyuluhan Pertanian.
2. Data Kebijaksanaan Pemerintah yaitu berupa data tentang rencana kegiatan operasional pembangunan pertanian yang telah ditetapkan pemerintah pada wilayah kerja tertentu dan rekomendasi-rekomendasi teknologi yang dianjurkan untuk tahun pelaksanaan Programa Penyuluhan Pertanian.
3. Data Petani-Nelayan dan Usahatani-Nelayannya, yaitu berupa data tentang petani-nelayan beserta keluarganya termasuk penerapan teknologi dalam usahatani-nelayan di wilayah kerja BPP bersangkutan.

Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut harus mutakhir, katagoris, akurat dan lengkap serta saling menunjang dan berkaitan

satu sama lain. Data-data pendukung untuk penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dapat bersumber dari :

- a. Kumpulan Data Wilayah Kerja Lengkap BPP.
- b. Kumpulan Sasaran Produksi Pertanian yang telah diproyeksikan untuk setiap Repelita.

Data dan informasi keadaan yang diperlukan dalam penyusunan Program Penyuluhan Pertanian tingkat WKBP adalah sebagai berikut :

1. Data Wilayah Kerja meliputi :
 - a. Data Desa dan WKPP-WKPP.
 - b. Data Usahatani-Nelayan.
 - c. Data Fisik seperti topografi, jenis tanah, iklim, curah hujan (yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian).
 - d. Data Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan lain yang terkait dengan penyuluhan pertanian (LKMD, Posyandu, PKK, dan lain-lain).
 - e. Data catur sarana (Penyuluhan Pertanian, Perbankan, KUD dan Kios).
 - f. Data Sarana Penyuluhan Pertanian.
 - g. Data Fasilitas Usahatani-Nelayan.
2. Data Kebijakan Pemerintah meliputi :
 - a. Sasaran peningkatan Produksi Pertanian melalui program diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi.
 - b. Jenis Usahatani yang akan dikembangkan.
 - c. Jenis teknologi baru yang akan dianjurkan.
 - d. Rekomendasi Usahatani-Nelayan.
 - e. Kerjasama dengan pihak lain yang terkait.
3. Data Petani-Nelayan meliputi :
 - a. Peranan Petani-Nelayan dalam peningkatan produksi pertanian.
 - b. Tingkat pelaksanaan mimbar sarasehan.
 - c. Data pelaksanaan mimbar sarasehan.

- d. Data Kelas Kelompok.
- e. Data Tabungan Kelompok.
- f. Data Kelembagaan Tani-Nelayan (KUD, Kelompok tani, dan lain-lain).
- g. Data Sosial Ekonomi Petani-Nelayan (misalnya income/kapita, tenaga kerja produktif, klasifikasi tingkat pendidikan, usia, jumlah anggota keluarga dan luas usahatani).

Data dan informasi tersebut menjadi bahan untuk dianalisa guna menetapkan masalah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

B. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu.

Dalam rangka penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian ada 2 macam tujuan yaitu :

1. Tujuan umum yaitu pernyataan secara umum apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
2. Tujuan khusus yaitu pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan ditetapkan berdasarkan keadaan yang telah dirumuskan serta diselaraskan dengan kepentingan dan keinginan pemerintah dan petani-nelayan beserta keluarganya, sehingga menggambarkan sasaran program pembangunan pertanian dan perubahan perilaku petani-nelayan beserta keluarganya.

C. MASALAH

Masalah adalah faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Faktor-faktor penyebab itu ada yang bersifat perilaku dan ada juga yang bersifat non perilaku. Bila terdapat masalah yang bersifat non perilaku, selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya masalah non perilaku tersebut sehingga akhirnya bisa dirumuskan menjadi masalah yang bersifat perilaku.

Contoh.

1. Masalah non perilaku.

Penggunaan PPC/ZPT pada tanaman padi program Supra Insus di WKBPP A, baru mencapai 20% dari luas areal Supra Insus 8.000 ha.

2. Masalah perilaku.

Sebagian besar petani pelaksana Supra Insus di WKBPP A (80%) belum yakin terhadap kemampuan PPC/ZPT dapat meningkatkan produksi.

Namun tidak semua masalah non perilaku dapat dirubah menjadi masalah yang bersifat perilaku.

Pada contoh masalah non perilaku, setelah diidentifikasi ternyata faktor penyebabnya yaitu tidak cukupnya Jumlah PPC/ZPT yang di-drop oleh penyalur. Dengan demikian masalah non perilaku tersebut tidak bisa dirumuskan menjadi masalah yang bersifat perilaku.

D. CARA MENCAPAI TUJUAN

Cara mencapai tujuan adalah penyusunan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemampuan petani-nelayan dan keluarganya.
2. Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
3. Situasi lingkup kegiatan penyuluhan pertanian baik fisik maupun non fisik (sosial, ekonomi dan budaya).
4. Tingkat kemampuan penyuluh dan petugas penyuluhan pertanian.
5. Biaya yang mungkin disediakan.

Ada 3 (tiga) jenis rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian.
2. Rencana Kegiatan Penunjang dan Kemudahan Program Penyuluhan Pertanian.
3. Rencana Kegiatan Latihan Penyuluh/Petugas Pertanian.



Salah satu metode Penyuluhan Pertanian yang dapat dipergunakan yaitu Temu Wicara.

Dalam cara mencapai tujuan perlu menentukan kombinasi metoda penyuluhan pertanian yang tepat untuk diterapkan. Beberapa metoda penyuluhan pertanian dan metoda latihan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

Metoda Penyuluhan Pertanian.

a. Pendekatan Perorangan terdiri dari :

- Kunjungan Perorangan (ke tempat usahatani, ke rumah)
- Penggunaan Surat/Telepon
- Magang

b. Pendekatan Kelompok terdiri dari :

- Kursus Tani-Nelayan
- Demonstrasi Cara/Hasil
- Kunjungan Kelompok
- Karyawisata
- Diskusi Kelompok, Ceramah
- Pertunjukan Film/Slide/OHP
- Penyebaran Brosur/Bulletin/Folder/Liptan
- Asah Terampil
- Mimbar Sarasehan/Musyawaharah/Rembug Utama/Rembug Madya
- Temu Wicara/Temu Usaha/Temu Karya/Temu Lapang.

c. Pendekatan Massal terdiri dari :

- Pameran
- Penas (Pekan Nasional)
- Peda (Pekan Daerah)
- Pertunjukan Film/Wayang/Drama
- Penyebaran melalui Siaran Radio/TV/Surat Kabar/Selebaran/Majalah
- Pemasangan Poster/Spanduk

III. MEKANISME, PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

A. MEKANISME PENYUSUNAN

Untuk menyerasikan dan menyelaraskan kegiatan penyuluhan pertanian serta memadukan kepentingan Pemerintah dan kepentingan Petani-Nelayan, guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai suatu tujuan, maka mekanisme penyusunan program penyuluhan pertanian pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

Koordinasi penyusunan program Penyuluhan Pertanian untuk tingkat WKBPP dilaksanakan oleh Kepala BPP yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penulisan konsep program penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Kepala BPP, Para PPUP, Instansi Subsektor lingkup pertanian-Kecamatan/WKBPP dan KTNA tingkat WKBPP, Bila PPUP yang menangani bidang tertentu belum ada maka salah satu PPUP berkonsultasi dengan sub sektor yang bersangkutan.
2. Pembahasan dan penyempurnaan konsep dilaksanakan oleh Kepala BPP, para PPUP, para PPL dan wakil KTN setiap WKPP KTNA WKBPP, para KCD lingkup Pertanian tingkat Kecamatan, Pemuda tani, Ketua KUD dan Tokoh Masyarakat lainnya.
3. Pengesahan Program Penyuluhan Pertanian melalui rapat pengesahan yang dihadiri oleh :
 - Kepala BPP.
 - Para PPUP di WKBPP bersangkutan.
 - Para Penyuluh Pertanian Lapangan di WKBPP bersangkutan.
 - Kepala Cabang Dinas/Dinas lingkup Pertanian tingkat Kecamatan se WKBPP.
 - Pejabat Pemda (Camat, Kepala Desa/Ketua LKMD).
 - Ketua Kelembagaan Tani-Nelayan (KUD, PKK, dan lain-lain).



Kursus Tani salah satu metode penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani

- Kontaktani-Nelayan yang diwakili oleh KTN tingkat WKBPP (Dewasa, Wanita, Taruna) Wakil KTN dari setiap WKPP dan Pemuka Tani/Tokoh Masyarakat lainnya.

B. PROSEDUR PENYUSUNAN

1. Tahapan Penyusunan.

Sesuai dengan rumusan pengertian Program Penyuluhan Pertanian, maka tahapan penyusunan suatu program dapat dibagi atas 4 (empat) tahap yang urutannya sebagai berikut :

- Tahap Pertama : PERUMUSAN KEADAAN
- Tahap Kedua : PENETAPAN TUJUAN
- Tahap Ketiga : PENETAPAN MASALAH YANG MUNGKIN DIHADAPI
- Tahap Keempat : PENETAPAN CARA MENCAPAI TUJUAN

Tahap Pertama : PERUMUSAN KEADAAN

a. Data dan Informasi

Sebelum keadaan dirumuskan perlu dilakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi meliputi wilayah kerja, kebijaksanaan pemerintah dan petani-nelayan beserta keluarganya serta usahatani-nelayannya. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data tentang keadaan yang nyata pada saat itu, data potensi dan data penunjang lainnya.

Data dan informasi yang dikumpulkan bagi perumusan keadaan adalah sebagai berikut :

(1). Data Wilayah Kerja.

Data ini diperlukan untuk memperoleh :

- a). Gambaran mengenai keadaan berbagai komoditi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang berada di wilayah kerja BPP yang bersangkutan yang erat kaitannya dengan program penyuluhan pertanian (data aktual).
- b). Gambaran mengenai potensi berbagai bidang lingkup pertanian yang mungkin dicapai/diusahakan di wilayah kerja BPP yang bersangkutan (data potensial).

Data dan informasi tersebut merupakan data yang berasal dari masing-masing Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) yang ada di WKBPP.

Data tersebut bisa diperoleh dari Penyuluh dan Petugas lingkup pertanian, Kantor Desa/LKMD atau Instansi lain yang terkait. Cara untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi program penyuluhan pertanian tahun sebelumnya (jika sudah ada).
- b). Mempelajari dan menganalisa laporan-laporan.
- c). Permintaan melalui surat.
- d). Menghubungi langsung melalui wawancara.
- e). Hasil pengamatan langsung ke lapangan.

(2) Data Kebijakan Pemerintah.

Data dan informasi ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang kebijaksanaan pemerintah yang sedang atau akan dilaksanakan dalam pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP bersangkutan dan berbagai rekomendasi teknologi yang dianjurkan untuk tahun pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian.

Data dan informasi tersebut bisa diperoleh dari Dinas lingkup pertanian tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Instansi terkait, serta Camat dan Kepala Desa/LKMD yang berada di wilayah kerja BPP bersangkutan. Cara untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Mempelajari produk hukum (SK Bupati/Walikota, SE, SKB, Juklak, Juknis, dan lain-lain) tentang pembangunan pertanian sesuai dengan kepentingan wilayah kerjanya.
- b). Mempelajari program dan proyek pembangunan pertanian.
- c). Menghubungi Dinas/Instansi lingkup pertanian tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan.

(3). Data Petani—Nelayan dan Usahatani—Nelayan.

Data dan informasi ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang kelembagaan petani—nelayan, penerapan teknologi usahatani—nelayan, keadaan sosial ekonomi petani—nelayan, rencana-rencana kegiatan kelompok petani—nelayan (RDK) dan faktor-faktor penghambat serta pendorongnya.

Data dan informasi tersebut bisa diperoleh dengan cara :

- a). Wawancara langsung kepada petani—nelayan dan keluarganya dengan menggunakan kuesioner/daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

- b). Mempelajari laporan-laporan dari Penyuluh Pertanian, KCD, Kontaktani, hasil evaluasi, data sekunder dan lain-lain.
 - c). Memperhatikan hasil-hasil kesempatan Musyawarah, Mimbar Sarasehan, Temu Wicara, dan pertemuan-pertemuan petani—nelayan lainnya.
 - d). Mempelajari hasil-hasil pengamatan lapangan, seperti kunjungan DPRD Dati II dan KTNA Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- b. Analisa Keadaan.

Setelah data dan informasi terkumpul diperiksa dan disesuaikan dengan keperluan, kemudian diolah dan dianalisa sehingga diperoleh hasil analisa keadaan yang digunakan sebagai bahan penetapan masalah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.



Pengujian merupakan salah satu cara untuk memperoleh data rekomendasi teknologi lokal.

Tahap Kedua : PENETAPAN TUJUAN.

Penetapan tujuan dilakukan bersama antara pihak Pemerintah dan pihak petani—nelayan serta tokoh masyarakat lainnya sehingga rumusan tujuan tersebut menggambarkan kepentingan dan keinginan kedua belah pihak.

Dalam menetapkan tujuan umum dirumuskan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan GBHN.
- b. Ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat petani—nelayan.
- c. Menggambarkan perubahan perilaku petani—nelayan dan keluarganya.

Untuk menetapkan tujuan khusus dirumuskan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Adanya kegiatan (action) dengan penjelasannya.
- b. Jelas peserta dan pelaksanaannya.
- c. Dapat diukur, dimonitor dan dievaluasi.
- d. Jelas lokasi/daerah kerjanya.
- e. Jelas waktu atau jangka waktunya.

Tahap Ketiga : PENETAPAN MASALAH YANG MUNGKIN DIHADAPI.

Setelah tujuan ditetapkan maka tahapan berikutnya adalah penetapan masalah yang mungkin dihadapi. Masalah masalah ini berupa faktor penyebab tidak tercapainya tujuan. Faktor penyebab itu dapat bersifat perilaku dan non perilaku. Kedua faktor tersebut dapat digali dan ditemukan antara lain petani—nelayan dan kelembagaannya, prasarana, sarana, kelembagaan penunjang dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

Untuk penetapan masalah dapat dilakukan berbagai cara antara lain :

- a. Menggunakan teknik faktor penentu.
- b. Pengamatan petugas ke lapangan.
- c. Analisa terhadap laporan/monitoring, data sekunder, hasil pengkajian, dan sebagainya.
- d. Mempelajari hasil kesempatan musyawarah mimbar sarasehan, dan lain-lain.

Masalah dirumuskan berdasarkan hasil analisa keadaan dan tujuan yang ingin dicapai.

Tahap Keempat : **PENETAPAN CARA MENCAPAI TUJUAN.**

Penetapan cara mencapai tujuan adalah penyusunan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai. Pada dasarnya ada 2 (dua) macam kegiatan dalam tahap penetapan cara mencapai tujuan, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja merumuskan rancangan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan khusus dari Programa Penyuluhan Pertanian dengan penerapan kombinasi beberapa metode penyuluhan pertanian.
- b. Rancangan tersebut dianjurkan dalam rapat pembahasan untuk ditanggapi secara musyawarah dan ditetapkan sebagai rencana kegiatan dalam program penyuluhan pertanian.

Untuk maksud itu ada 3 (tiga) rencana kegiatan yang harus disusun yaitu :

- a. Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian, dituangkan dalam bentuk daftar yang meliputi analisa keadaan, tujuan, masalah, kegiatan/metode sasaran, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab pelaksanaan, pelaksana dan pihak lain yang terkait.

- b. Rencana Kegiatan Penunjang dan Kemudahan Program Penyuluhan Pertanian dituangkan dalam bentuk daftar yang meliputi analisa keadaan, tujuan, masalah, kegiatan, metode, sasaran, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab pelaksanaan, pelaksana dan pihak lain yang terkait.
- c. Rencana Kegiatan Latihan Petugas dituangkan dalam bentuk daftar yang meliputi analisa keadaan, tujuan, masalah, kegiatan/metode, sasaran, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab pelaksanaan, pelaksana dan pihak lain yang terkait.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Taklimat (Pemberian petunjuk, instruksi, dan sebagainya).
- b. Peningkatan kemampuan Kontakani—Nelayan.
- c. Penetapan materi penyuluhan pertanian.
- d. Pelaksanaan metode-metode dan sistim kerja.
- e. Pengamatan lapangan dan pengawasan pelaksanaan berbagai kegiatan serta pemecahan masalah.
- f. Pengikhtiaran sarana dan kemudahan-kemudahan.
- g. Peningkatan kemampuan penyuluh/petugas pertanian (latihan dan lain-lain).
- h. Kerjasama dengan berbagai pihak.
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Langkah — Langkah Penyusunan.

Dalam Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian tingkat WKBPP ada beberapa langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:

- Pertama : PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA
- Kedua : PENYUSUNAN KONSEP PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
- Ketiga : PEMBAHASAN KONSEP PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Keempat : PERBAIKAN KONSEP PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

Kelima : PENGESAHAN PROGRAM PENYULUHAN PER-
TANIAN.

a. Langkah Pertama : PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN
ANALISA DATA.

Maksud pengumpulan data dan informasi adalah untuk memperoleh gambaran keadaan keluarga tani—nelayan dan kelembagaannya dan usahatani—nelayan, prasarana, sarana, kelembagaan penunjang penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan pertanian yang sedang atau akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan.

Data dan informasi tersebut diolah dan dianalisa sesuai dengan keperluan, sehingga diperoleh hasil analisa keadaan yang digunakan sebagai bahan penetapan masalah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dilaksanakan setelah kelompok tani selesai menyusun RDK yaitu bulan September—Oktober. Pelaksanaannya dilakukan oleh Penyuluh dan Petugas Pertanian.

b. Langkah Kedua : PENYUSUNAN KONSEP PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.

Setelah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data selesai, langkah selanjutnya adalah penyusunan konsep Program Penyuluhan Pertanian secara tertulis yang berisikan rumusan keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan. Dalam Perumusan cara mencapai tujuan yang dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, hendaknya dipertimbangkan secara matang kemungkinan dukungan dana.

Penulisan konsep program Penyuluhan Pertanian dilakukan oleh sebuah tim seperti yang tercantum pada Bab III A. Konsep Program Penyuluhan Pertanian harus selesai disusun bulan

Nopember—Desember.

1).Penulisan Rumusan Keadaan.

Rumusan keadaan yang disajikan dalam Programa Penyuluhan Pertanian berupa :

- a. data dan informasi penting yang berkaitan dengan tujuan.
- b. hasil analisa keadaan.

2).Penulisan Rumusan Tujuan.

Rumusan tujuan ada 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum disajikan berupa uraian mengenai sasaran kegiatan jangka panjang secara kualitatif dan perubahan perilaku. Tujuan khusus disajikan berupa uraian mengenai sasaran kegiatan secara kuantitatif dan perubahan perilaku yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

3).Penulisan Rumusan Masalah Rumusan masalah berdasarkan Prioritas.

Prioritas masalah berdasarkan kepada :

- a). Apakah masalah itu menyangkut mayoritas petani—nelayan
- b). Apakah masalah itu menyangkut kebijaksanaan pemerintah.
- c). Apakah masalah itu menyangkut penanggulangan kerugian yang lebih besar.
- d). Apakah masalah itu menyangkut kemampuan penyediaan dana dan fasilitas lainnya (tenaga, peralatan, dan lain-lain).

4).Penulisan Cara Mencapai Tujuan.

Rumusan cara mencapai tujuan dalam Programa Penyuluhan Pertanian disusun dalam bentuk daftar Rencana Kegiatan. Untuk memudahkan penelusuran keterkaitan antara Analisa Keadaan, Tujuan, Masalah dan Cara Mencapai Tujuan dapat digunakan kodifikasi pada rencana kegiatan. Ada tiga rencana kegiatan yang disusun dalam bentuk daftar (halaman berikut).

**3. RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS
DAN PENYULUH PERTANIAN
TAHUN**

No.	Analisa Keadaan (Ak)	Tujuan Khusus (TK)	Masalah (M)	Kegiatan/ Metoda (Kg)	Sasaran (S)	Lokasi (L)	Waktu (W)	Biaya (B)	Sumber biaya (Sb)	P. Jawab (Pj)	Pelaksa- na (Pl)	Pihak Lain Terkait (Pt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Penggunaan kodefikasi pada penyajian daftar rencana kegiatan dimaksudkan untuk mempersingkat uraian yang panjang, terutama pada Analisa Keadaan dan Masalah. Kode yang dituliskan pada daftar tersebut harus sama dengan kode pada uraian tentang masing-masing bab (bab Analisa Keadaan dan bab Masalah).

No.	Analisa Keadaan (Ak)	Masalah (M)
1.	Ak. 1.1. Ak. 1.2.	M. 1. 1.
2.	Ak. 2.1. Ak. 2.2. Ak. 2.3.	M. 2. 1. M. 2. 2.

c. Langkah Ketiga : PEMBAHASAN KONSEP PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN.

Maksud dari pembahasan konsep program penyuluhan pertanian adalah untuk memeriksa dan memperbaiki kembali rumusan keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan yang telah disusun secara tertulis oleh Tim Penyusun.

Pembahasan konsep program tersebut pelaksanaannya seperti diuraikan pada Bab III.A. Konsep Program Penyuluhan Pertanian tersebut harus sudah selesai dibahas dan disempurnakan pada bulan Januari.

Langkah Keempat : PERBAIKAN KONSEP PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.

Perbaikan konsep program penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan hasil pembahasan dan selesai pengertian pada bulan Februari sebagai Program Penyuluhan Pertanian yang akan disahkan melalui rapat pengesahan di masing-masing WKBPP.

e. Langkah Kelima : PENGESAHAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.

Maksud pengesahan ini adalah untuk diketahui dan mendapatkan kesempatan bersama bahwa Program Penyuluhan Pertanian diterima sebagai pemandu kegiatan penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP masing-masing.

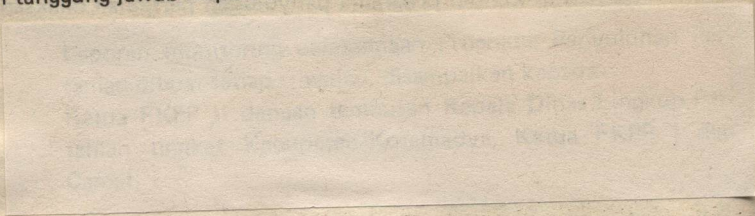
Rapat pengesahan Program Penyuluhan Pertanian tingkat WKBPP dihadiri secara lengkap seperti yang tercantum pada Bab III. A. Program Penyuluhan Pertanian sudah disahkan pada bulan Maret dan ditandatangani oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Para PPUP dan Ketua KTNA tingkat WKBPP dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat pengesahan.

C. PROSEDUR PENYAMPAIAN PROGRAM.

Programa Penyuluhan Pertanian yang telah disahkan, diperbanyak dan selanjutnya disampaikan kepada :

1. Ketua FKPP II.
2. Ketua FKPP I.
3. Kepala Dinas Dati II lingkup pertanian.
4. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas.
5. Kepala Cabang Dinas lingkup Pertanian tingkat Kecamatan se WKBPP.
6. Ketua Kelompok KTNA tingkat WKBPP.
7. Pejabat Pemda tingkat Kecamatan minimal se WKBPP.
8. Penyuluh Pertanian Lapangan.
9. Pihak lain yang dianggap perlu.

Penyampaian Program Penyuluhan Pertanian tersebut menjadi tanggung jawab Kepala BPP.





Penyebaran teknologi dan hasil-hasil Pertanian melalui Pameran.

IV. PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN.

Setelah konsep Program disahkan menjadi Program Penyuluhan Pertanian melalui rapat pengesahan, selanjutnya pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

Sebelum Program Penyuluhan Pertanian tersebut dilaksanakan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan antara lain :

- a. Mengadakan pertemuan-pertemuan (Rapat) dengan para pelaksana (petugas dan petani-nelayan) dan penanggung jawab untuk membahas rencana kegiatan penyuluhan (action plan) yang disusun secara kronologis berikut tahapan kerjanya sebagai pengecekan akhir. Pengecekan rencana kegiatan tersebut meliputi kesiapan, penjelasan jenis kegiatan, jadwal kegiatan, tempat, peralatan, bahan, biaya dan lain-lain.
- b. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan APBN/APBD, seperti kunjungan, pertemuan kelompok dan lain-lain dapat dilaksanakan mulai awal April.

2. Penyesuaian Program.

Untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan APBN/APBD, jika ternyata ada yang tidak didukung anggaran maka setelah turunnya DIP/DIK harus diadakan penyesuaian terlebih dahulu, sehingga ada kepastian untuk pelaksanaannya.

3. Penyusunan Rencana Kerja.

Sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian maka pelaksana kegiatan harus menyusun rencana kerja berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian tingkat WKBP bersangkutan.

B. PELAKSANAAN PROGRAM.

Setelah rencana pelaksanaan kegiatan Program Penyuluhan

Pertanian dipersiapkan oleh penanggung jawab dan para pelaksana dari masing-masing kegiatan, maka kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Prinsip-prinsip Pelaksanaan.

- a. Agar para pelaksana dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang sudah direncanakan dengan baik maka mereka perlu mengetahui sasaran dengan tepat menguasai materi kegiatan, menguasai teknologi yang diperlukan, menumbuhkan motivasi, memelihara iklim gairah kerja dan memupuk kerjasama.
- b. Program Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai pemandu sehingga dapat membimbing para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran. Setiap ada penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan harus selalu dikembalikan atau disesuaikan dengan Program Penyuluhan Pertanian.

2. Revisi.

Revisi ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu yaitu bila ada ketidakcocokan antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Program Penyuluhan Pertanian, misalnya dana tidak sesuai dengan yang direncanakan, kekeliruan menetapkan sasaran atau perubahan-perubahan kebijaksanaan yang mendadak dan lain-lain. Kegiatan revisi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait dan ikut bertanggung jawab dalam pengesahan program penyuluhan pertanian. Rumusan hasil revisi harus disampaikan kepada peserta musyawarah tersebut dan kepada pihak yang berkepentingan.

C. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM.

1. Monitoring (Pemantauan)

Monitoring Program Penyuluhan Pertanian adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berikut

masalah-masalahnya melalui pengumpulan data secara teratur, sehingga jika terjadi penyimpangan dapat diketahui secara dini dan dapat segera diperbaiki. Di samping itu, data dan informasi hasil monitoring dijadikan bahan untuk evaluasi.

Kegiatan monitoring Program Penyuluhan Pertanian disesuaikan dengan kegiatan evaluasi yaitu meliputi 3 aspek sebagai berikut :

- (a) aspek penyusunan program
- (b) aspek pelaksanaan program dan
- (c) aspek keberhasilan Program Penyuluhan Pertanian.

a. Monitoring terhadap aspek penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, yaitu dengan menggunakan 3 indikator sebagai berikut :

- 1). Ada/tidaknya Program Penyuluhan Pertanian hasil penyusunan yang telah disyahkan.
- 2). Isi program (keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan) apakah telah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam pedoman.
- 3). Prosedur penyusunan Program, apakah telah sesuai dengan pedoman.

Laporan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian disampaikan kepada instansi terkait setiap tahun sekali.

b. Monitoring terhadap aspek pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian tingkat WKBPP, yaitu dengan menggunakan format laporan sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

TINGKAT WKBP Ta.19...../19..... TRIWULAN KE

No.	Kegiatan	Volume Kegiatan				Materi	Metoda/ Teknik	Sasaran	Masalah	Pemecahan masalah	Keterangan (***)
		RA *)		RE **)							
		Fisik	%	Fisik	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) Rencana setahun dalam fisik dan (%)

**) Realisasi s/d Triwulan Laporan fisik dan (%)

***) Bila ada perubahan dari rencana semula.

Laporan monitoring pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian dibuat setiap triwulan, disampaikan kepada :

Ketua FKPP II dengan tembusan Kepala Dinas Lingkup Pertanian tingkat Kabupaten/Kotamadya, Ketua FKPP I dan Camat.

- C. Monitoring aspek keberhasilan Program Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan pelaporan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan 3 bulan sekali, dan disampaikan kepada Instansi terkait, untuk mendapatkan tindak lanjut.

- c. Monitoring aspek keberhasilan Programa Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan pelaporan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam Programa Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan 3 bulan sekali, dan disampaikan kepada Instansi terkait, untuk mendapatkan tindak lanjut.

2. Evaluasi Programa.

Evaluasi Programa merupakan kegiatan untuk mengukur dan menilai langkah-langkah proses penyusunan, pelaksanaan dan keberhasilan Programa Penyuluhan Pertanian. Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Programa Penyuluhan Pertanian.

Aspek Programa Penyuluhan Pertanian dapat dievaluasi melalui :

- a) Penyusunannya
- b) Pelaksanaannya
- c) Keberhasilannya

a. Evaluasi Penyusunan.

Evaluasi terhadap Penyusunan Programa diperinci menjadi cakupan materi yang tercantum dalam programa dan prosedur penyusunan yang telah ditempuh dalam penyusunan programa. Evaluasi cakupan materi programa bertujuan untuk mengukur apakah Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun tersebut berdasarkan :

- 1). Kelengkapan data dalam merumuskan keadaan dan analisisnya.
- 2). Kejelasan dalam merumuskan tujuan.
- 3). Kejelasan dalam merumuskan masalah.
- 4). Kesesuaian kegiatan/metode untuk mencapai tujuan.
- 5). Kejelasan dalam merumuskan rencana kegiatan.

Evaluasi prosedur penyusunan Programa bertujuan untuk mengetahui apakah Programa Penyuluhan Pertanian tersebut disusun sesuai langkah-langkah yang ditetapkan dalam pe-

doman yang meliputi :

- 1).Pengumpulan, pengolahan dan analisa data
- 2).Penyusunan konsep programa lengkap
- 3).Pembahasan konsep programa
- 4).Perbaikan konsep programa
- 5).Pengesahan programa.

Kegiatan evaluasi penyusunan Penyuluhan Pertanian ini dilaksanakan berdasarkan laporan/monitoring, ditelaah berdasarkan buku pedoman. Umumnya cara penilaian/evaluasi dapat menggunakan katagori : baik, sedang, relevan, kurang relevan, tidak relevan atau persentase.

Evaluasi ini dilaksanakan setahun sekali yaitu setelah program Penyuluhan Pertanian disyahkan dan dikirimkan kepada masing-masing instansi terkait.

b. Evaluasi Pelaksanaan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian tingkat WKBPP adalah untuk mengukur kegiatan dibandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang tercantum dalam Program Penyuluhan Pertanian.

Aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan program meliputi :

- 1). Revisi Program
- 2). Pelaksanaan Kegiatan
- 3). Peranserta Kontaktani — Nelayan
- 4). Penerapan metode-metode
- 5). Peranserta Petugas/Penyuluh Pertanian
- 6). Perlengkapan, bahan dan biaya
- 7). Peranserta Dinas/Instansi lain yang terkait
- 8). Peranserta Pemerintah Daerah
- 9). Monitoring dan laporan Program

10).Evaluasi Program

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian ini dilaksanakan berdasarkan laporan, telaahan data dan pengamatan langsung. Penilaiannya dapat menggunakan katagori : baik, sedang, kurang atau persentase (%).

Evaluasi ini dilaksanakan setahun sekali, yaitu setelah berakhirnya pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian.

c. Evaluasi Keberhasilan.

Evaluasi terhadap keberhasilan Program adalah upaya untuk mengukur dan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran yang dirumuskan dalam Program Penyuluhan Pertanian.

Hasil evaluasi dapat dinyatakan secara kuantitatif (angka, satuan dan persentase) dan kualitatif (baik, sedang, kurang, relevan, kurang relevan, tidak relevan, dan sebagainya). Hasil evaluasi tersebut, kemudian dianalisa dengan cara membandingkan terhadap hasil yang dicapai tahun-tahun sebelumnya dan dengan rata-rata wilayah yang lebih luas mengenai produksi, produktivitas, perubahan perilaku dan lain-lain. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui keberhasilannya sebagai hasil evaluasi.

Hasil evaluasi keberhasilan program tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk yang mudah dibaca, seperti grafik garis atau bar chart. Kegunaan dari hasil evaluasi keberhasilan Program adalah sebagai bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian selanjutnya dan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi penentu kebijaksanaan.

Evaluasi keberhasilan Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan setahun sekali oleh suatu tim yang terdiri dari : Kepala BPP, para PPUP, KCD, KTNA tingkat WKBP atau bersama-sama PPS tingkat Kabupaten/Kotamadya. Penanggung jawab dan Ketua Tim Evaluasi adalah Kepala BPP.

D. LAPORAN PROGRAMA.

Laporan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat WKBPP adalah sebagai berikut :

1. Jenis Laporan.

- a. Laporan berbentuk Programa Penyuluhan Pertanian yang telah disyahkan melalui rapat pengesahan programa, dibuat setahun sekali.
- b. Laporan Pelaksanaan Programa Penyuluhan Pertanian berbentuk laporan triwulan.
- c. Laporan Revisi Programa Penyuluhan Pertanian.
- d. Laporan Evaluasi Programa Penyuluhan, dibuat setahun sekali.

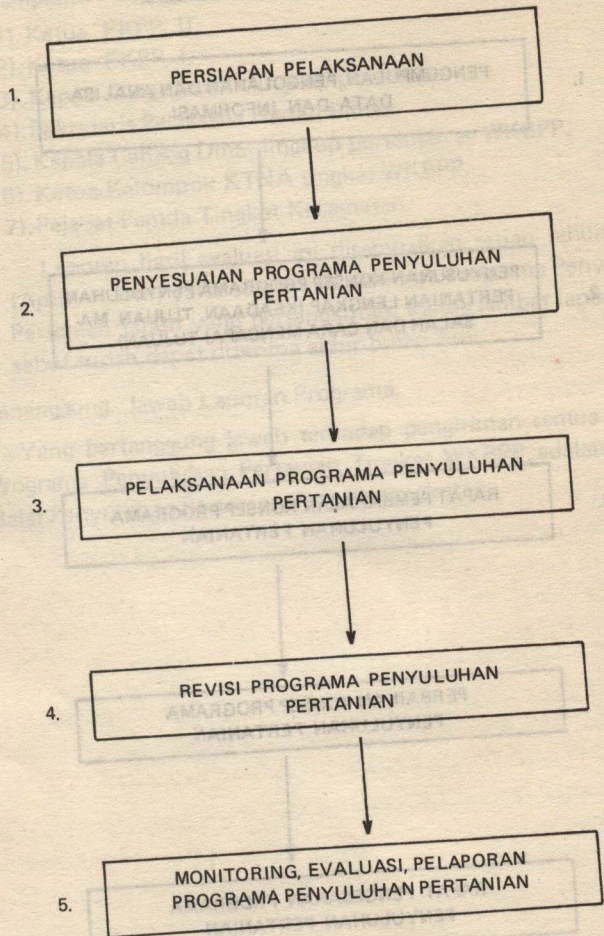
2. Waktu dan Penyampaian Pelaporan.

- a. Laporan yang berbentuk Programa Penyuluhan Pertanian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan seperti tertera pada prosedur penyampaian programa halaman 28. Paling lambat laporan tersebut sudah dikirim Bulan April.
- b. Laporan pelaksanaan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat WKBPP disampaikan kepada Instansi terkait yaitu :
 - 1).Ketua FKPP II.
 - 2).Ketua FKPP I.
 - 3).Kepala Dinas Dati II lingkup pertanian.
 - 4).Sekretaris Pelaksana Harian Bimas.
 - 5).Kepala Cabang Dinas lingkup pertanian se WKBPP.
 - 6).Ketua Kelompok KTNA tingkat WKBPP.
 - 7).Pejabat Pemda Tingkat Kecamatan se WKBPP.

Laporan pelaksanaan programa tersebut dikirimkan setiap triwulan yaitu 4 kali dalam setahun pada pertengahan bulan-bulan Juli, Oktober, Januari dan April.

- c. Laporan Rumusan Hasil Revisi Programa Penyuluhan Pertanian disampaikan kepada Instansi dan pihak-pihak yang

2. Skema Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian.



F. PEMBIAYAAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN.

Pada dasarnya dana untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan Programa Penyuluhan Pertanian dapat bersumber dari APBN, APBD, BUMN, Lembaga Swasta, Swadana Petani—Nelayan dan dana lainnya.

Kepala Badan,
t.t.d.

Ir. SYAMSUDDIN ABBAS
NIP. 080 015 407

Catatan :

Pada dasarnya, jenis-jenis struktur organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur formal dan struktur informal. Struktur formal adalah struktur yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi, sedangkan struktur informal adalah struktur yang terbentuk secara spontan di dalam organisasi.

Struktur Organisasi

Kepala Badan
119

SYAMSUDDIN ABAS
NIP. 080 018 401

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Catatan :

MILIK PERPUSTAKAAN KADAN DIKLATLUH
JALAN HARSANO HAR BANGUNAN PASARMINGGU
JAKARTA



Nomor : 01/B/1989 – 1990
Sumber : Badan Diklatluh Pertanian
Produksi : Balai Informasi Pertanian
Kalimantan Timur
P.O. Box 237 Samarinda
Sumber Dana : Proyek Pengembangan Penyuluhan
Pertanian Pusat/NAEP TA 89/90
Oplaag : 1.750 Exp.

TIDAK DIPERDAGANGKAN